

**OPTIMALISASI NILAI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN BOJONEGORO**

**Skripsi
Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Galang Putra Pratama
NIM : 31402300200

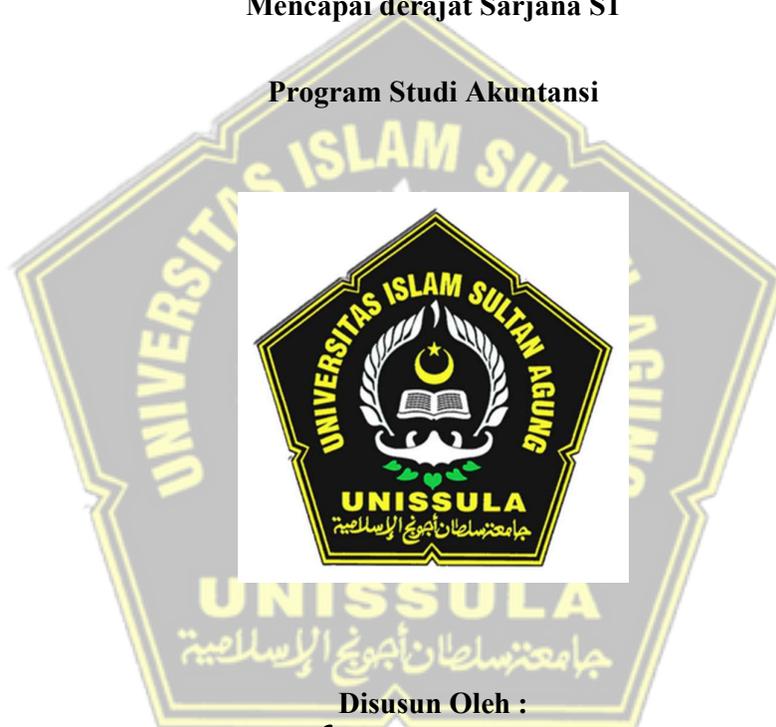
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI NILAI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN BOJONEGORO**

Skripsi

**Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Galang Putra Pratama

NIM : 31402300200

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

SKRIPSI
OPTIMALISASI NILAI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun Oleh :
Galang Putra Pratama
NIM : 31402300200

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan siding panitia ujian skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 26 Mei 2025

Pembimbing



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D

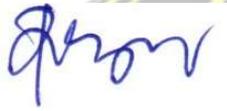
NIK. 211403012

**OPTIMALISASI NILAI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
KABUPATEN BOJONEGORO**

Disusun Oleh :
Galang Putra Pratama
NIM : 31402300200

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 26 Mei 2025

Pembimbing,



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP.,
IFP., Ph.D
NIK 211403012

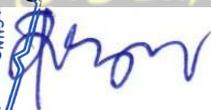
Dosen Review,



Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt.,
CA., CRP
NIK 211406018

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 26 Mei 2025

Ketua Program Studi S-1 Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D
NIK 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galang Putra Pratama

NIM : 31402300200

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul:

**“Optimalisasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Bojonegoro”**

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Galang Putra Pratama
NIM. 31402300200

ABSTRAK

OPTIMALISASI NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI KABUPATEN BOJONEGORO

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui Alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Meningkatnya anggaran diikuti dengan meningkatnya risiko inheren memaksa pemerintah daerah untuk melaksanakan pengendalian internal dengan baik. Penelitian ini mengkaji implementasi SPIP di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan komitmen kuat melalui penilaian maturitas SPIP terintegrasi secara berkelanjutan, didukung oleh Surat Keputusan Bupati Nomor 188/665/KEP/412.013/2024. Namun, kualitas pengendalian internal yang tercermin dalam penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan penurunan dari 3,227 pada tahun 2022 menjadi 3,205 pada tahun 2023. Penurunan nilai maturitas terjadi pada tiga komponen: penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian indikator kinerja, pengendalian aset yang lemah, dan pelaporan keuangan yang kurang andal. Strategi optimalisasi meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi teknologi informasi melalui aplikasi seperti SI-PINTER dan e-SAKIP, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan yang berfokus pada program strategis nasional. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Faktor penurunan nilai SPIP, dan Upaya Optimalisasi nilai SPIP

ABSTRACT

The budget allocation of the Bojonegoro Regency Government has increased over the past five years. This rising budget, coupled with growing inherent risks, has compelled the local government to implement effective internal controls. This study examines the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) in Bojonegoro Regency, demonstrating a strong commitment through continuous integrated SPIP maturity assessments, supported by Surat Keputusan Bupati 188/665/KEP/412.013/2024. However, the quality of internal controls, as reflected in the maturity assessment of the integrated SPIP implementation, declined from 3.227 in 2022 to 3.205 in 2023. This decrease in maturity score was observed in three components: objective setting, structure and processes, and achievement of objectives, caused by misaligned performance indicators, weak asset control, and unreliable financial reporting. Optimization strategies include enhancing human resource capacity, implementing information technology through applications such as SI-PINTER and e-SAKIP, and conducting continuous oversight and evaluation focused on national strategic programs. These efforts are expected to improve the quality of local governance.

Keywords: *Government Internal Control System (SPIP), Maturity Assessment of Integrated SPIP Implementation, Factors Contributing to the Decline in SPIP Scores, and Efforts to Optimize SPIP Scores*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Kabupaten Bojonegoro”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sudah sepatutnya dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., IFP., Ph.D, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga penulis mendapat pengetahuan yang dapat digunakan dimasa yang akan datang.
5. Kepada Bapak Andreas Prawata dan Ibu A. Etty Yuliasuti selaku orang tua, serta Gilang Putra Permana dan Azarel Genta Maharani selaku adik kandung yang selalu memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih untuk teman-teman S-1 Akuntansi RPL Bojonegoro yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih untuk rekan-rekan kerja di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan semua pihak yang telah memberi bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwasanya masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini sehingga pembaca dapat memberikan kritik dan saran guna menjadikan skripsi ini lebih baik.

Semarang, 26 Mei 2025

Penulis,



Galang Putra Pratama
NIM. 31402300200



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	9
2.1 LANDASAN TEORI.....	9
2.2 PENELITIAN TERDAHULU.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1. DESAIN PENELITIAN.....	15
3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	16
3.3. TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	17
BAB IV PROFIL ORGANISASI.....	18
4.1. PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	18
4.2. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS ORGANISASI.....	19
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	22
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nilai SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.....	4
Tabel 2. 1 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	16
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4. 1 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2023.....	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.....	2
Gambar 2. 1 Hubungan Unsur dan Tujuan SPIP	13
Gambar 2. 2 Komponen Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi	16
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro	18



BAB I

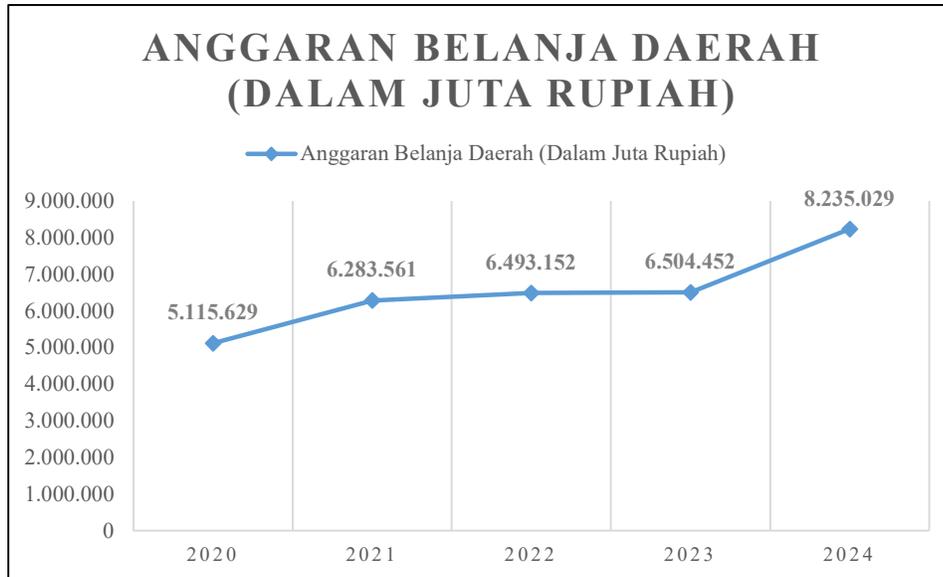
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah diberikan wewenang yang sangat krusial bagi perkembangan wilayah administrasinya. Hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi pemerintah daerah selaku pelayan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman di tengah masyarakat (Soares, Nurpratiwi, & Makmur, 2015). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap pemerintah daerah menyusun visi serta misi daerah yang kemudian dijabarkan melalui sasaran strategis pemerintah daerah dan didelegasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro telah merumuskan 22 sasaran strategis pada tahun 2023 yang dilimpahkan kepada berbagai OPD antara lain Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, 21 dinas, 6 badan, dan 28 kecamatan. Guna mewujudkan sasaran strategis yang telah dipercayakan oleh Bupati, selaku pemimpin instansi pemerintah, setiap OPD kemudian melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan bidang yang diampu. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD). Anggaran belanja pada APBD Kabupaten Bojonegoro memiliki tren kenaikan selama lima tahun ke belakang dan dapat dilihat dalam diagram berikut.

Gambar 1. 1 Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro

Program dan anggaran yang dimiliki masing-masing OPD tentunya memiliki risiko inheren yang melekat dan dapat mengancam pencapaian tujuan pemerintah daerah. Untuk mengantisipasi terjadinya dampak dari berbagai risiko tersebut, setiap OPD harus membangun suatu sistem pengendalian internal untuk menjaga agar risiko tetap pada tingkat tertentu yang dapat ditolerir (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2014).

Pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Guna memastikan bahwa SPIP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diberikan wewenang untuk melaksanakan penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi. Penilaian maturitas penyelenggaraan

SPIP terintegrasi pada tingkat pemerintah daerah dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan OPD secara menyeluruh melalui mekanisme penilaian mandiri yang kemudian dilakukan penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) daerah. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Bojonegoro dengan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai leading sektor-nya dan diimplementasikan melalui terbitnya Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/2055/KEP/412.013/2023 Tentang Penetapan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 3 Huruf c Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kemudian dievaluasi oleh BPKP untuk menghasilkan nilai final maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan dua kali, yakni pada tahun 2022 dan 2023 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Nilai SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

No	Komponen/ Unsur/ Subunsur	Nilai	
		2022	2023
1	PENETAPAN TUJUAN	1,400	1,400
a.	Kualitas Sasaran Strategis	0,800	0,600
b.	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	0,600	0,800
2	STRUKTUR DAN PROSES	0,822	0,845
a.	Lingkungan Pengendalian	0,251	0,259
b.	Penilaian Resiko	0,137	0,180
c.	Kegiatan Pengendalian	0,227	0,204
d.	Informasi dan Komunikasi	0,083	0,090
e.	Pemantauan	0,126	0,109
3	PENCAPAIAN TUJUAN	1,005	0,960
a.	Efektivitas dan Efisien pencapaian Tujuan		
	- Capaian Outcome	0,135	0,210
	- Capaian Output	0,135	0,120
b.	Keandalan Pelaporan Keuangan	0,375	0,225
c.	Pengamanan atas Aset	0,180	0,225
d.	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	0,180	0,180
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,227	3,205

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Berdasarkan Gambar 1 dan Tabel 1, diketahui bahwa tren kenaikan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama lima tahun terakhir tidak disertai dengan kenaikan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Bahkan penilaian SPIP di Kabupaten Bojonegoro baru mulai dilaksanakan pada 2022 yang berarti belum pernah dilakukan penilaian atas sistem pengendalian

internal pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pun menunjukkan adanya penurunan nilai yang semula sebesar 3,227 pada tahun 2022 menjadi 3,205 pada tahun 2023. Penurunan nilai tersebut diindikasikan berasal dari empat subunsur, yaitu pada kualitas sasaran strategis, kegiatan pengendalian, kegiatan pemantauan, dan keandalan pelaporan keuangan. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 berada pada level 3, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mendefinisikan dan merancang strategi pencapaian kinerja dengan baik namun pelaksanaan pengendalian internal belum efektif.

Beberapa penelitian terdahulu telah menganalisis hubungan antara anggaran belanja, kinerja pemerintah, dan kualitas pengendalian internal. Contohnya dalam penelitian Pujiono, Sukarno, dan Puspitasari (2016) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah. Dalam penelitian yang lain, Kricy dan Simbel (2021) juga menjelaskan bahwa SPIP berpengaruh simultan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pemerintah. Penerapan sistem pengendalian internal, melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi atas aktivitas operasional, juga berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan *fraud* dalam sebuah instansi (Azizah & Erinoss, 2022).

Di sisi lain, beberapa penelitian terdahulu juga telah menganalisis implementasi pelaksanaan SPIP pada instansi pemerintah dan menemukan beberapa kekurangan dalam implementasi tersebut. Seperti pada penelitian Indriani dan Siswantoro (2023) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan SPIP di instansi

pemerintah masih memerlukan optimalisasi pada aspek lingkungan pengendalian dan pemantauan pengendalian internal. Kelemahan pelaksanaan SPIP di instansi pemerintah juga disebabkan oleh kompetensi sumber daya manusia yang kurang memadai serta prosedur evaluasi kinerja yang belum optimal (Farmanta, 2022).

Secara garis besar peneliti-peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan keuangan, kinerja pemerintah, dan upaya pencegahan *fraud*, namun masih membutuhkan optimalisasi dalam pelaksanaannya. Fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa tren kenaikan anggaran belanja tidak disertai dengan kenaikan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Maka dari itu, Peneliti merasa perlu melakukan analisis mengenai kondisi dan faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 serta berusaha memberikan solusi optimalisasi pencapaian nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tahun mendatang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan pada sub bab latar belakang di atas, Peneliti hendak menguji beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bojonegoro?
- 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Bojonegoro?

- 3) Bagaimana strategi mengoptimalkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Bojonegoro?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menganalisis kondisi nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat penelitian dilakukan;
- 2) Untuk menganalisis faktor penyebab penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Bojonegoro;
- 3) Untuk menganalisis bagaimana strategi optimalisasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Bojonegoro.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, diharapkan penelitian ini memberikan pandangan dan pengetahuan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

- (1) Kondisi serta praktik yang dianalisis pada penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan atas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di pemerintah daerah secara umum;
- (2) Analisis atas adanya *research gap* dimaksudkan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk bisa mengembangkan sistem pengendalian internal agar nilai maturitas pengendalian SPIP terintegrasi tidak mengalami penurunan;
- (3) Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi, informasi, dan nilai tambah yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk bisa mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik di masa mendatang.

1.5 RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti membatasi ruang lingkup penulisan terkait fenomena penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada periode penilaian tahun 2022 hingga 2023.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam enam bab dan lampiran sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini Peneliti akan menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Peneliti akan menghadirkan serta menguraikan secara singkat kondisi riil tema penelitian dan *research gap* yang didapati. Peneliti juga merumuskan fokus rumusan masalah guna menentukan tujuan dari penelitian ini.

Bab 2 Tinjauan Literatur

Pada bab ini, Peneliti akan mendeskripsikan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Teori-teori tersebut diharapkan mampu membantu Peneliti dalam menyusun kerangka berfikir penelitian serta menganalisis data atau informasi yang didapatkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian

Pada bab ini Peneliti akan menjelaskan metodologi penelitian yang akan digunakan untuk menyusun kerangka berfikir, memperoleh data, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian.

Bab 4 Profil Organisasi

Dalam Bab ini Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yang mencakup kondisi geografi dan administrasi objek penelitian, visi, misi, sasaran strategis, dan struktur organisasi yang digunakan objek penelitian.

Bab 5 Analisis

Pada Bab ini Peneliti akan melakukan kajian serta analisis atas data atau informasi yang didapatkan. Peneliti akan mengaitkan data hasil analisis dengan rumusan

masalah penelitian berdasarkan teori-teori yang menjadi kerangka pikir penelitian. Hasil analisis data menjadi dasar bagi Peneliti untuk mengambil kesimpulan dan solusi.

Bab 6 Kesimpulan dan Solusi

Pada Bab ini Peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan menarik kesimpulan atas proses analisis yang telah dilakukan. Peneliti juga berharap dapat memberikan saran serta nilai tambah bagi objek penelitian guna dijadikan bahan evaluasi dan pembenahan di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Agensi

Penelitian ini dilandaskan pada teori agensi (*agency theory*) yang menjelaskan mengenai perilaku manusia dalam hubungan antara pemilik/entitas dengan agen terkait tujuan dan konflik kepentingan di antara kedua pihak tersebut (Moloi & Marwala, 2020). Konflik kepentingan dalam teori agensi muncul ketika pemilik/entitas menuntut pekerjaan dengan lebih besar dari yang diusahakan oleh agen (Scott, 2015).

Dalam kaitannya dengan pengendalian internal, teori agensi menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dapat menjadi alat yang digunakan manajemen untuk meminimalkan masalah keagenan (Djadjdikerta, 2004). Lebih lanjut lagi menurut Sami, Wang, dan Zhou (2011), pengendalian internal yang berkualitas tinggi dapat berpengaruh pada tata kelola, kinerja, dan valuasi yang semakin baik.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengertian sistem pengendalian internal berdasarkan Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (2012) mendefinisikan pengendalian internal sebagai.

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (2) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pemerintah untuk memberikan keyakinan memadahi atas pencapaian tujuan lembaga pemerintah terkait tata kelola operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

2.1.2.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (2), SPIP terdiri atas lima unsur, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Unsur-unsur SPIP dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Lingkungan Pengendalian

Kewajiban dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian guna mengembangkan lingkungan yang positif dan kondusif untuk penerapan SPIP melalui berbagai upaya, antara lain:

- Penegakan nilai etika dan integritas;
- Komitmen mengenai kompetensi;
- Kepemimpinan yang kondusif;
- Penyusunan struktur organisasi yang didasarkan pada kebutuhan;
- Delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang tepat;
- Kebijakan pembinaan sumber daya manusia yang disusun dan diterapkan secara sehat;
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko atas tujuan instansi pemerintah. Identifikasi dan analisis resiko untuk menentukan dampak resiko terhadap pencapaian tujuan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan Tingkat resiko yang dapat diterima.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian yang sekurang-kurangnya memiliki karakter sebagai berikut.

- Diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- Disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- Penetapan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
- Pelaksanaan atas prosedur yang ditetapkan harus dicatat dan didokumentasikan secara tertulis;
- Terdapat kegiatan evaluasi atas pengendalian secara teratur.

d. Informasi dan Komunikasi

Kewajiban bagi pemimpin instansi pemerintah untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif yang sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- Mengelola, memperbaiki, dan mengembangkan sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang telah dijalankan oleh organisasi harus dipantau melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit atau reviu. Pemantauan pengendalian internal menjadi kewajiban dari pemimpin instansi.

2.1.2.3 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan dilaksanakannya SPIP pada lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas beberapa aspek, antara lain:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 1 Hubungan Unsur dan Tujuan SPIP



Sumber: Website Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2.1.3 Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

2.1.3.1 Pengertian Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Ruang Lingkup Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Ruang lingkup penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

a. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu penilaian mandiri oleh manajemen K/L/D, penjaminan kualitas oleh APIP K/L/D, dan evaluasi penilaian mandiri serta penjaminan kualitas oleh BPKP.

b. Fokus Penilaian

Fokus penilaian adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi yang mencakup unsur SPIP, MRI, IEPK, dan Kapabilitas APIP.

c. Komponen Penilaian

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari tiga komponen, antara lain:

- Penetapan tujuan

Komponen penetapan tujuan dilaksanakan guna menilai kualitas perencanaan sasaran strategis beserta strategi pencapaiannya.

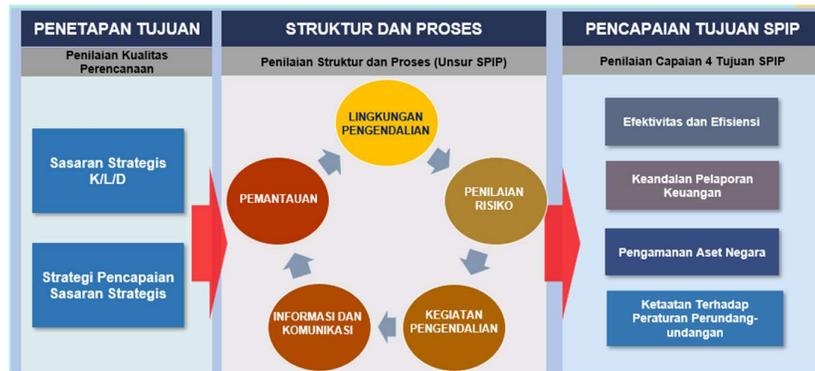
- Struktur dan Proses

Komponen struktur dan proses dilaksanakan guna menilai sejauh mana pelaksanaan unsur-unsur SPIP dalam sebuah organisasi, antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

- Pencapaian Tujuan

Komponen pencapaian tujuan dilaksanakan guna menilai kemampuan organisasi dalam mencapai empat tujuan SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. 2 Komponen Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi



Sumber: Website Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

d. Periode Penilaian

Periode penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilakukan pada rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya hingga 30 Juni tahun berjalan. Penilaian komponen penetapan tujuan serta struktur dan proses atas dokumen periode tahun berjalan. Sedangkan pada komponen pencapaian tujuan untuk periode tahun sebelumnya.

2.1.3.3 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Level	Karakteristik
Level 5 Optimum	Organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya secara baik, relevan, dan terintegrasi, dengan struktur dan

	proses pengendalian yang efektif dan adaptif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi.
Level 4 Terkelola dan Terukur	Organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya secara baik, relevan, dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian yang efektif namun belum adaptif.
Level 3 Terdefinisi	Organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dan strategi pencapaian kinerjanya secara baik, relevan, dan terintegrasi, namun penerapan pengendalian belum efektif.
Level 2 Berkembang	Kinerja organisasi telah didefinisikan dengan baik, namun strategi pencapaian kinerja belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
Level 1 Rintisan	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian untuk memperluas dan memperdalam teori adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Kesimpulan	Perbedaan
1	Pujiono, Sukarno, dan Puspitasari (2016)	Pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kuantitatif • Lokus pada Provinsi Maluku Utara
2	Kricy dan Simbel (2021)	SPIP berpengaruh simultan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kuantitatif • Lokus pada Kabupaten Kotawaringin Timur
3	Azizah dan Erinos (2022)	Penerapan sistem pengendalian internal, melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi atas aktivitas operasional, juga berpengaruh positif terhadap upaya pencegahan <i>fraud</i> dalam sebuah instansi	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kuantitatif • Lokus pada Kabupaten Solok Selatan
4	Indriani dan Siswantoro (2023)	Penerapan SPIP di instansi pemerintah masih memerlukan optimalisasi pada aspek lingkungan pengendalian dan pemantauan pengendalian internal	Lokus penelitian berbeda
5	Farmanta (2022)	Kelemahan pelaksanaan SPIP di instansi pemerintah juga disebabkan oleh kompetensi SDM yang kurang memadai serta prosedur evaluasi kinerja yang belum optimal	Lokus pada Inspektorat Kabupaten Buton Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. DESAIN PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam menyusun penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Fiantika, et al. (2022) adalah penelitian yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan suatu peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek penelitian. Lebih lanjut dalam buku yang sama, Fiantika (2022) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah penggunaan pola pikir induktif, yaitu cara berfikir empiris-rasional yang membangun suatu konsep dari sumber data lapangan.

Tipe pendekatan kualitatif yang dipilih Peneliti adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memahami latar belakang suatu persoalan secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistik (Harahap, 2020). Peneliti bermaksud untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai penyebab terjadinya penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sehingga dapat memberikan saran optimalisasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di tahun berikutnya.

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

5.2.1 Observasi

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung pada kegiatan dan aktivitas yang ada dalam lapangan. Kegiatan observasi menghasilkan data primer dengan bukti berupa dokumentasi.

5.2.2 Wawancara

Peneliti bermaksud untuk mendapatkan data primer melalui permintaan keterangan dan wawancara semi-terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait. Target informan yang akan diwawancara adalah kepala subbagian program dan laporan dan/atau analis kebijakan pada sembilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah melaksanakan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan bukti berupa rekaman video atau suara. Teknik wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh Peneliti namun tetap terbuka pada pertanyaan dan respon lanjutan yang dapat muncul ketika wawancara dilaksanakan. Maksud penggunaan teknik wawancara semi-terstruktur adalah untuk

memberi ruang yang lebih luas kepada Peneliti dan informan sehingga mampu menggali informasi secara lebih mendalam.

5.2.3 Studi Pustaka

Peneliti melakukan kajian atas literatur berupa buku, jurnal ilmiah, catatan penting milik objek penelitian, dan peraturan terkait guna mendukung pemahaman teoritis mengenai tema penelitian. Selain itu, Peneliti mengumpulkan beberapa dokumen yang berisikan data dan fakta guna mendukung proses analisis tema penelitian.

3.3. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Data primer yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara akan dikombinasikan dan/atau disandingkan dengan data sekunder guna menemukan gambaran atas kondisi serta kriteria yang sebenarnya terjadi. Proses analisis data tersebut dimaksudkan untuk menemukan sebuah kesimpulan penelitian yang selanjutnya digunakan untuk menjawab titik kritis pada rumusan masalah penelitian. Kesimpulan penelitian diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini, yaitu menemukan dan menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta memberikan solusi optimalisasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di masa yang akan datang.

BAB IV

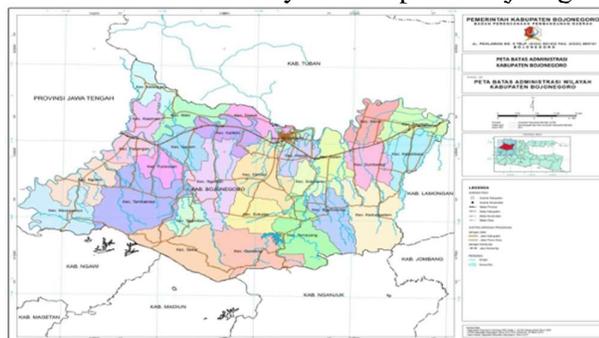
PROFIL ORGANISASI

4.1. PROFIL DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencakup 2.311,25 km² atau sekitar 4,82% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan. Wilayah Kabupaten Bojonegoro terletak pada koordinat 6° 59' sampai 7° 37' Lintang Selatan dan 112° 25' sampai 112° 09' Bujur Timur serta berbatasan dengan beberapa kota dengan uraian berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Madiun, Nganjuk, dan Jombang Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kabupaten Bojonegoro



Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2018-2023

4.2.VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS ORGANISASI

4.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk periode 2018 - 2023 adalah “Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”.

4.2.2. Misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Guna mewujudkan visi yang telah dirumuskan untuk periode 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum fakir miskin (dhuafa).
5. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif.
6. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
7. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

4.2.3. Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Sasaran strategis yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya kesadaran kehidupan sosial masyarakat berlandaskan kearifan lokal	a. Indeks Kesetaraan b. Indeks Kerjasama
2	Meningkatnya toleransi kehidupan beragama	Indeks Toleransi
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka Pelanggaran Trantibum
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	a. SAKIP b. Opini BPK
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE
6	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Bebas dari KKN	a. Nilai SPI b. MCP Kabupaten
7	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel	a. Indeks Merit Sistem b. IP ASN
8	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
9	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan
10	Meningkatnya daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda
11	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup
12	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Daya Beli
13	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender

14	Meningkatkan pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat	Indeks Gini
15	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja
16	Meningkatnya PDRB	PDRB Kabupaten
17	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Investasi
18	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan ketaatan terhadap tata ruang	a. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur b. Persentase Tingkat Ketaatan Tata Ruang
19	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai Kinerja Infrastruktur Permukiman dan keciptakaryaan
20	Meningkatnya kualitas dan pemerataan insfrastruktur sumber daya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi
21	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
22	Menurunnya Resiko Bencana yang didukung kualitas lingkungan hidup yang baik	Indeks Resiko Bencana

Dalam menjalankan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendelegasikan tugas dan wewenang kepada berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, 21 Dinas, 6 Badan, dan 28 Kecamatan.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Bojonegoro

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses dan kegiatan berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan lembaga pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan lembaga pemerintah terkait tata kelola operasi, pelaporan, dan kepatuhan. SPIP memiliki peran yang cukup krusial dalam tata kelola pemerintah daerah yang sering kali digunakan untuk mengidentifikasi proses bisnis yang kurang efisien, mengelola tingkat risiko yang dapat diterima, dan memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan.

Kesadaran atas pentingnya SPIP direspon secara positif oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dapat dilihat pada komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk selalu melakukan perbaikan dan pemantauan atas sistem pengendalian internalnya. Upaya perbaikan dan pemantauan tersebut diimplementasikan melalui penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang dilakukan secara terus-menerus. Pemantauan tersebut juga mendapatkan dukungan dari semua lini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, mulai dari tingkat pimpinan daerah hingga organisasi perangkat daerah. Dukungan dan komitmen tersebut diejawantahkan dalam penerbitan surat keputusan yang mengatur mengenai

tim pelaksana penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Surat keputusan terakhir yang diterbitkan adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/665/KEP/412.013/2024 Tentang Penetapan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Surat keputusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan penilaian SPIP dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai leading sector-nya.

Saat ini, nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 berada pada level 3 dengan skor 3,205. Level 3 pada maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah berhasil merumuskan kinerjanya dengan jelas beserta dengan perumusan strategi pencapaian yang telah sesuai dan saling terintegrasi. Akan tetapi, pada level tersebut masih dimungkinkan adanya kekurangan yang secara garis besar disebabkan oleh pelaksanaan pengendalian belum berjalan secara efektif.

5.2. Penurunan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro berada dalam tiga komponen penilaian dengan rincian sebagai berikut.

5.2.1 Penetapan Tujuan

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro pada komponen penetapan tujuan terjadi pada

subunsur kualitas sasaran strategis dengan nilai 0,800 di tahun 2022 menjadi 0,600 di tahun 2023. Penurunan nilai tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan. Dimulai dari level perangkat daerah, penetapan target serta indikator kinerja pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya tepat dan mempertimbangkan target kinerja pada level di atasnya. Hal tersebut mengakibatkan sasaran strategis perangkat daerah/ OPD yang tidak terkait dengan sasaran strategis pada pemerintah daerah sehingga terjadi kesulitan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dampak selanjutnya yang dapat terjadi adalah tata kelola pemerintahan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika indikator kinerja dan target kinerja yang telah disusun oleh OPD tidak selaras dengan target pada indikator rencana strategis dan rencana pembangunan daerah, maka risiko kegagalan pemenuhan sasaran serta tujuan yang ditetapkan akan semakin meningkat.

Selain itu, sasaran program dan sasaran kegiatan yang dirumuskan oleh OPD pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih belum berorientasi hasil sehingga kualitas sasaran OPD masih dalam level output. Sasaran yang berorientasi hasil merupakan salah satu aspek penting guna memastikan bahwa tata kelola pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. Dengan memiliki sasaran yang berorientasi hasil, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa tata kelola mengarah pada pencapaian hasil yang terukur dan berdayaguna. Akan tetapi, masih terdapat sasaran program/kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro yang masih merumuskan target kinerja yang berorientasi output. Target kinerja yang berorientasi output berarti memfokuskan kinerja hanya pada jumlah atau kuantitas jasa layanan yang dihasilkan. Orientasi output dapat menyebabkan OPD di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk terlalu fokus pada unsur administratif dan keterlaksanaan proses dibandingkan pada hasil yang ditargetkan oleh level di atasnya. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan proses dalam memastikan orientasi hasil dari sasaran program dan kegiatan OPD dan akan menyebabkan kelemahan dalam penetapan sasaran.

Kelemahan yang terdapat pada level perangkat daerah tentunya berpengaruh pada kualitas penetapan tujuan pada level di atasnya, yaitu pada tingkat pemerintah daerah. Kegagalan penetapan target, indikator, dan sasaran dari level perangkat daerah dapat meningkatkan risiko kegagalan sasaran dan target pada tingkat pemerintah daerah. Jika hal tersebut terjadi, maka sasaran strategis Kabupaten Bojonegoro tidak dapat mendukung perencanaan jangka menengah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara penuh. RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arah pembangunan daerah di masa yang akan datang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya memperhatikan perencanaan jangka menengah daerah pada RPJMD. Hal tersebut

mengakibatkan meningkatnya risiko kegagalan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

5.2.2 Struktur dan Proses

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro pada komponen struktur dan proses terjadi pada subunsur kegiatan pengendalian (semula 0,227 pada tahun 2022 menjadi 0,204 pada tahun 2023) Hal tersebut disebabkan karena masih ditemukan adanya kelemahan pada parameter-parameter penilaian subunsur tersebut. Salah satu parameter yang mengalami kelemahan adalah pengendalian fisik atas aset yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas dan efektifitas serta efisiensi dari tata kelola aset daerah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan atas pengendalian fisik aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dapat dilihat pada sistem pencatatan aset yang masih mengalami kekurangan sehingga catatan atas aset daerah tidak akurat. Hal tersebut mengindikasikan tidak adanya prosedur pencatatan aset yang jelas sehingga terjadi kelemahan dalam pengendalian fisik atas aset.

Parameter lain dalam subunsur pengendalian yang mengalami kelemahan adalah parameter penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja. Indikator dan ukuran kinerja merupakan alat untuk menilai suatu tingkat keberhasilan program/kegiatan hingga pada level sasaran strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dan reviu atas indikator dan

ukuran kinerja di Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada analisis penurunan nilai SPIP pada komponen penetapan tujuan, dimana masih ditemukan ketidakselarasan antara target/indikator/sasaran di level perangkat daerah dengan level di atasnya. Kemudian ditemukan lagi adanya penetapan target kinerja yang belum berorientasi pada hasil. Hal-hal tersebut meningkatkan risiko kegagalan dalam pemenuhan target kinerja dan rancangan arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Selain itu, parameter dokumentasi atas SPI dan transaksi atau kejadian penting dalam subunsur pengendalian di Kabupaten Bojonegoro juga mengalami kelemahan. Dokumentasi yang akurat dan lengkap atas SPI dan transaksi atau kejadian penting digunakan guna memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Namun, penerapan tata kelola dokumentasi atas SPI, transaksi, dan kejadian penting di Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif. Kelemahan tersebut disebabkan oleh proses pencatatan yang kurang akurat sehingga terdapat kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Bojonegoro pada komponen struktur dan proses juga berada pada kegiatan pemantauan (semula 0,126 pada tahun 2022 menjadi 0,109 pada tahun 2023). Salah satu parameter pada subunsur pemantauan adalah parameter pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan

memegang peranan penting dalam tata kelola suatu pemerintah daerah karena digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam lingkup organisasi sehingga program atau kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kegiatan pemantauan berkelanjutan dilaksanakan melalui berbagai macam cara, antara lain adanya supervisi, tata kelola yang bersifat rutin, serta perbandingan dan rekonsiliasi. Akan tetapi, penerapan kegiatan pemantauan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif dan menunjukkan bahwa evaluasi berkala atas pengendalian intern pada Kabupaten Bojonegoro masih belum dilaksanakan secara konsisten dan maksimal oleh para pemangku kepentingan.

Parameter evaluasi terpisah juga merupakan parameter menurun yang menunjukkan bahwa evaluasi terpisah di Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif. Kelemahan dalam evaluasi terpisah berkaitan dengan frekuensi dan cakupan evaluasi yang tidak memadai. Evaluasi terpisah seharusnya dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pengendalian intern di seluruh unit kerja. Namun, evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sering kali hanya bersifat reaktif, artinya baru dilaksanakan ketika terdapat permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi reaktif tersebut tidak terlepas pada kondisi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mengalami keterbatasan jumlah auditor internal di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Dengan jumlah

auditor yang terbatas, tidak semua OPD dapat dievaluasi secara menyeluruh dalam satu periode penilaian dan juga menghambat proses monitoring tindak lanjut atas rekomendasi.

5.2.3 Pencapaian Tujuan

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro pada komponen pencapaian tujuan terjadi pada subunsur keandalan pelaporan keuangan dengan nilai 0,375 pada tahun 2022 menjadi 0,225 pada tahun 2023. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya penurunan terhadap capaian outcome dan output dari target kinerja program serta kegiatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Target kinerja yang tidak tercapai menjadi salah satu indikasi bahwa sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaan program yang belum cukup matang dalam mendorong tercapainya kinerja organisasi. Penurunan capaian kinerja juga disebabkan oleh kelemahan dalam proses penetapan tujuan dimana perumusan target dan indikator kinerja di tingkat perangkat daerah masih belum sesuai dengan tujuan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan meningkatnya risiko kegagalan pencapaian tujuan. Hal ini juga dapat disebabkan oleh proses perencanaan program/kegiatan yang kurang tepat sehingga target kinerja kurang realistis dan realisasi kegiatan tidak mendukung target pada level di atasnya.

Penurunan nilai pada komponen ini juga disebabkan oleh adanya temuan berulang dalam LHP Audit BPK dalam 5 tahun terakhir. Hasil

penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern, seperti adanya bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui temuan ketaatan BPK dan keamanan serta pengelolaan aset yang kurang memadai. Hal ini diperparah dengan masih ditemukannya keterlambatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil temuan BPK wajib disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Akan tetapi, pada praktiknya masih ditemukan rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Temuan berulang dan keterlambatan tindak lanjut BPK dapat mengindikasikan rendahnya tingkat pemantauan dan monitoring di Kabupaten Bojonegoro serta adanya akar masalah yang belum teridentifikasi pada tata kelola Pemerintah Daerah

5.3 Strategi Optimalisasi Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Sistem pengendalian internal disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjadi suatu komponen penting dalam memastikan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berada pada level 3 yang berarti bahwa perumusan kinerja daerah yang sudah sesuai namun belum diimbangi sistem pengendalian yang efektif. Oleh karena itu, optimalisasi sistem

pengendalian internal sangat diperlukan untuk semakin menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas. Upaya-upaya optimalisasi nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada beberapa aspek sebagai berikut.

5.3.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor terjadinya penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah pada kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki terutama aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) yang memegang peranan penting dalam sistem pengendalian internal daerah. Kapasitas sumber daya manusia ini menyangkut baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Maka dari itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan suatu aspek yang perlu ditingkatkan untuk menjaga atau bahkan mendongkrak level SPIP Kabupaten Bojonegoro pada masa yang akan datang. Strategi yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada Inspektorat, adalah peningkatan kapasitas SDM yang mencakup penambahan jumlah APIP, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta optimalisasi pengelolaan aparatur.

Pertama, pengembangan kuantitas APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan upaya peningkatan cakupan serta frekuensi pengawasan yang dapat dilaksanakan pada satu periode tertentu. Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Nomor: S-258/K/JF/2021 Tentang Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, total kebutuhan jabatan fungsional auditor (JFA) di Kabupaten Bojonegoro adalah sejumlah 67 orang. Sedangkan jumlah JFA yang ada di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro hingga 31 Desember 2024 hanya sejumlah 31 pegawai atau 46,27 persen, sehingga masih terdapat selisih jumlah APIP yang perlu dipenuhi. Untuk merespon kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara resmi telah membuka penerimaan CPNS auditor sejumlah 20 formasi melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 810/3095/412.301/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 810/60/412.301/2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 2 Mei 2025 para CPNS secara resmi telah diangkat. Penambahan kuantitas APIP tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan cakupan serta frekuensi pengawasan dan pemantauan.

Kedua, strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah SDM saja, tetapi juga pada segi kualitas APIP yang meliputi kemampuan teknis dan profesionalisme. Salah satu strategi utama dalam pengembangan kualitas APIP adalah pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis yang berbasis risiko. Sebagai contoh, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro selalu menginformasikan, mendukung,

dan memfasilitasi pengembangan kompetensi bagi APIP. Setiap tahun, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro secara konsisten menugaskan pegawainya untuk mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan yang berkaitan dengan manajemen risiko, pengendalian internal, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian diharapkan APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat memiliki kompetensi dasar serta profesionalisme sehingga pengawasan berjalan konsisten guna menghasilkan rekomendasi serta saran yang relevan dan membangun.

Pengembangan sumber daya manusia APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan upaya yang mencakup peningkatan kuantitas dan kualitas secara terpadu. Penambahan jumlah APIP melalui rekrutmen CPNS auditor dan peningkatan kualitas melalui pelaksanaan pelatihan serta bimbingan teknis diharapkan mampu meningkatkan kompetensi APIP guna menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola yang efisien melalui pengabdianya.

5.3.2 Implementasi Teknologi Informasi

Berbagai faktor penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro membutuhkan upaya perbaikan dan evaluasi yang efektif supaya peningkatan nilai SPIP dapat segera dicapai. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga perlu memastikan

perbaikan SPIP yang dilakukan memiliki transparansi, konsistensi, dan kredibilitas. Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membutuhkan inovasi pada sistem pengendalian internal dan dapat diwujudkan dengan bantuan teknologi informasi. Kebutuhan tersebut disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan diimplementasikan melalui peluncuran berbagai aplikasi internal yang dikelola oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu.

Sebagai contohnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai pengampu, meluncurkan aplikasi SI-KEPO dan SI-MANTAP. Aplikasi sistem kepegawaian dirancang untuk memudahkan para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memantau tingkat integritas, kompetensi, dan kepatuhan pegawai. Selain itu, aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses pengendalian internal sebagai alat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pegawai. Aplikasi SI-KEPO dirancang untuk memantau tingkat kepatuhan pegawai melalui pemberian data real-time absensi yang memudahkan evaluasi kinerja individu dan unit kerja. Sementara itu, Aplikasi SI-MANTAP berfokus pada optimalisasi administrasi kepegawaian guna meminimalisir kesalahan pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi administrasi kepegawain.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melalui Inspektorat, telah mengembangkan dan meluncurkan sebuah aplikasi bernama SI-PINTER sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan sistem pengendalian

internal pemerintah daerah. Aplikasi ini dapat memudahkan tugas APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko, yang merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian internal. Melalui SI-PINTER, proses pemetaan risiko dapat dilakukan secara lebih terstruktur serta efisien, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berbasis manajemen risiko.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga meluncurkan aplikasi e-SAKIP yang bertujuan untuk memungkinkan perangkat daerah untuk mengumpulkan dokumen seperti rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja, dan laporan capaian secara berkala dalam satu pintu. Data yang telah dikirimkan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan keselarasan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks pengendalian internal, e-SAKIP mendukung transparansi dengan pengelolaan terpusat dan memudahkan proses validitas data guna memungkinkan Inspektorat untuk melakukan rewiu dan tindak lanjut evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memanfaatkan aplikasi dari lembaga atau kementerian pusat dalam proses penilaian SPIP, manajemen risiko, dan kapabilitas APIP. Penggunaan aplikasi tersebut memungkinkan penilaian atas lima unsur SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dengan pendekatan ini, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dapat mengukur tingkat maturitas SPIP secara periodik dengan tingkat standar yang terukur.

Penerapan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menyelaraskan sistem pengendalian internal dengan standar nasional. Walaupun belum ada sinkronisasi data antar aplikasi internal maupun antara aplikasi daerah dengan aplikasi pusat, implementasi teknologi informasi ini telah menciptakan fondasi bagi upaya optimalisasi proses pengendalian internal di Kabupaten Bojonegoro. Lebih jauh lagi, upaya ini diharapkan dapat menjaga level maturitas SPIP atau bahkan meningkatkan nilai SPIP di masa yang akan datang.

5.3.3 Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Upaya optimalisasi pada proses pengawasan dan evaluasi berkelanjutan merupakan aspek yang sangat krusial dalam pemenuhan kualitas pengendalian internal suatu organisasi. Kondisi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang semakin meningkat dan tingkat kompleksitas program kegiatan yang semakin beragam menjadi tantangan tersendiri bagi sistem pengendalian internal. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun suatu strategi dan prioritas pelaksanaan pengawasan dan evaluasi di lingkup tata kelolanya.

Pada penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan syarat penilaian yang harus dipenuhi. Penilaian SPIP harus dilakukan terhadap 30 persen sasaran strategis dari pemerintah daerah dan sekaligus mencakup minimal 60% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Syarat minimal penilaian tersebut memungkinkan APIP untuk melakukan penilaian yang mencakup aspek strategis dan finansial sekaligus memberikan hasil yang representatif, efisien, dan berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun rencana pengawasan dan evaluasi yang dapat memenuhi syarat minimal tersebut.

Salah satu cara yang dapat menjawab syarat tersebut adalah dengan memfokuskan pengawasan pada program tematik strategis nasional, seperti contoh pada program pengentasan kemiskinan dan program stunting. Pengalihan fokus pengawasan pada program strategis nasional memungkinkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memastikan keselarasan kinerja pemerintah daerah dengan target program pemerintah pusat. Penjaminan keselarasan kinerja antara pusat dan daerah tersebut menjadi bentuk pengawasan dan pemastian tercapainya outcome dan output pemerintah daerah yang menjadi salah satu aspek penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya penurunan nilai yang semula sebesar 3,227 pada tahun 2022 menjadi 3,205 pada tahun 2023. Level 3 pada maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi menunjukkan bahwa perumusan kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah cukup jelas namun masih memungkinkan adanya kekurangan pada pelaksanaan pengendalian belum berjalan secara efektif.

Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro berada dalam tiga komponen penilaian, yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Secara garis besar faktor-faktor penyebab penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh kelemahan dan ketidakselarasan penyusunan target internal pemerintah daerah, kegiatan pengendalian dan evaluasi terpisah yang kurang matang, sistem pencatatan aset daerah yang belum optimal, adanya penurunan pada pencapaian target outcome dan output pemerintah daerah, serta adanya temuan berulang dari pemeriksaan BPK.

6.2. Saran

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melakukan upaya optimalisasi sistem pengendalian internal guna menjamin adanya tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur pengawas intern pemerintah (APIP) baik dari segi kualitas melalui berbagai bentuk pengembangan kompetensi maupun dari segi kuantitas sesuai dengan kebutuhan jabatan yang direkomendasikan BPKP. Peningkatan kualitas dan kualitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi APIP guna menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola yang efisien melalui pengabdianya.

2. Implementasi Teknologi Informasi

Dalam upaya pelaksanaan pengendalian internal yang memadahi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki berbagai aplikasi yang dapat menjadi *tools* pengendalian internal, antara lain SI-KEPO, SI-MANTAP, SI-PINTER, dan e-SAKIP. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga memanfaatkan aplikasi dari lembaga atau kementerian pusat dalam proses penilaian SPIP, manajemen risiko, dan kapabilitas APIP. Hal yang perlu dilakukan kedepannya adalah dengan melakukan upaya sinkronisasi, baik antar aplikasi internal maupun dengan aplikasi

eksternal, agar pelaksanaan pengendalian internal jauh lebih mudah, konsisten, dan berkualitas.

3. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan

Untuk memenuhi syarat penilaian maturitas SPIP terintegrasi yang ditetapkan BPKP, yaitu mencakup 30% sasaran strategis dan 60% APBD, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu menyusun strategi dan prioritas pengawasan yang terarah. Salah satu pendekatan efektif adalah memfokuskan pengawasan pada program tematik strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Langkah ini memastikan keselarasan kinerja daerah dengan target nasional, sekaligus mendukung pencapaian output dan outcome yang menjadi indikator maturitas SPIP, sehingga pengawasan menjadi lebih representatif, efisien, dan berdampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai maturitas SPIP, memperkuat tata kelola, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Erinoss. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Asimetri Informasi terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 674-685.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2014). *Audit Intern*. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. (2012). *Internal Control-Integrated Framework*. Amerika Serikat: Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission.
- Djajadikerta, H. (2004). Perbandingan Pengendalian Intern dan Pengendalian Manajemen dalam Hubungannya dengan Agency Theory. *Bina Ekonomi*, 1-109.
- Farmanta, Y. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia*.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., . . . Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publising.
- Indriani, R., & Siswanto, D. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Kricy, Y. D., & Simbel, M. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal of Environment and Management*.
- Moloi, T., & Marwala, T. (2020). *Artificial Intelligence in Economics and Finance Theories*. Johannesburg: Springer.

- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023. Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). *Bisma : Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 68-81.
- Sami, H., Wang, J., & Zhou, H. (2011). Corporate Governance and Operating Performance of Chinese Listed Firms. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 106-114.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory 7th Edition*. Toronto: Pearson.
- Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

